

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku:

Ahmad Fadlil Sumadi, *Hukum Dan Keadilan Sosial*, Materi Perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Tanpa Penerbit, Jakarta, 2002;

B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005;

Bagyono, *Pariwisata dan Perhotelan*, Alfabeta, Bandung, 2007;

Bambang Sutiyoso, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2005;

Bryan A. Garner, Black; *Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999;

C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992;

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005;

E. Utrecht/ Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983;

Esmi Warassih, *Penelitian Socio Legal*, Makalah Workshop Pemutakhiran Metodologi Hukum, Bandung, 2006;

Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004;

H. F. A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid II Cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta, 1984;

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul

- Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011;
- Hartono Soerjopratikno, *Perwakilan Berdasarkan Kehendak*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982;
- Hasyim Sofyan Lahilote, *Kajian Yuridis Terhadap Agen Perjalanan (Travel Agent) Dalam Bisnis Pariwisata*, Jurnal Al-Syir'ah Vol. 8, No. 2, Desember 2010;
- I Gede Pitana, *Sosiologi Pariwisata*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005;
- Ian Adams, *Ideologi Politik Muthakhir Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan*, Qalam, Yogyakarta, 2004;
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992;
- James J. Spillane, *Pariwisata Indonesia: Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta, 1994;
- Jawade Hafidzh, *Reformasi Kebijakan Hukum Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Semarang, 2014;
- Jonh Rawls, *A Theory of justice*, the Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, 1971;
- Joseph Raz, *The Concept of a Legal System, an Introduction to the The Theory of a Legal Sistem*, Cleredon Press, Oxford, 1970;
- Juhaya S. Praja, *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*, Prenada Media, Jakarta, 2008
- Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlaq*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985;
- Karen G. Turner, et.al, *The Limit of the Rule of Law in China*, seattle: University of Washington Press, 2000;
- Lili Rasyidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar maju, Bandung, 2000;

- M.A. Desky, *Pengantar Bisnis Biro Perjalanan Wisata*, Adi Citia Karya Nusa, Yogyakarta, 2001;
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012;
- Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *the Sage Handbook of Qualitative Research*, Edisi Ketiga, dialih bahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011;
- Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005;
- Nyoman S Pendit, *Glosari Pariwisata Kontemporer*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005;
- Oka A. Yoeti, *Ilmu Pariwisata, Sejarah, Perkembangan dan Prospeknya*, Perca, Bandung, 2006;
- _____, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Bandung, 1987;
- Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993;
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009;
- R. G. Soekadijo, *Anatomi Pariwisata Memahami Sebagai: Systemic Linkage*, Gramedia Pustaka Utama, Bandung, 2000;
- R. S. Damardjati, *Istilah-Istilah Dunia Pariwisata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001;
- Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002;
- Satijipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993;

- _____, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982;
- _____, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006;
- _____, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2000;
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992;
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985;
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1981;
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999;
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993;
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015;
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995;
- Violetta Simatupang, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, Alumni Bandung, tanpa tahun;
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1981;
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan Kelima, Jakarta, 2014.

2. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP-MPRS) Nomor I tahun 1960;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP-MPR) No.IV/MPR/1973 tentang GBHN;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1992 tentang Perkeretaapian;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.10/PW.102/MPPT93 tentang Ketentuan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 408/MPP/KEP/10/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;

International Union of Official Travel Organization (IUOTO);

International Convention on Contract Travel (ICCT).